

TINJAUAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANDUNG

**Rosa Fitriana
Andrean**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Bandung. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan masih belum memadai. Dibutuhkan pengembangan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh dan mendasar dalam menyikapi bencana. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu penanggulangan bencana juga perlu memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi, sehingga penanggulangan bencana yang dilakukan dapat menjadi bagian dari proses pembangunan yang mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sistem pertanggungjawaban yang baik tentu saja dapat memberikan informasi yang relevan dalam memperbaiki kinerja BPBD Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2014 telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 5 sasaran diaplikasikan menjadi 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja pencapaiannya berhasil 10 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa kriteria pencapaian indikator dinyatakan berhasil karena pencapaiannya melebihi angka 80% dan pencapaian kinerja dari BPBD dipengaruhi oleh indikator kinerja yang dilakukan oleh BPBD. Akuntabilitas Keuangan di BPBD Kabupaten Bandung juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : Kinerja, Akuntabilitas dan Akuntabilitas Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, BPBD membutuhkan peralatan kebencanaan terutama alat-alat evakuasi yang harusnya memiliki kualitas bagus sehingga diperlukan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan LKIP, yaitu pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, dan ketiga, Prinsip Manfaat, yang memberikan pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunan dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Permasalahan penanggulangan bencana tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Dalam penanggulangan bencana, kinerja organisasi dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menjadi koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas di bidang kebencanaan yang dituntut untuk bekerja secara optimal.

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut tanggap darurat, kesiapsiagaan dan

[Date]

profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sebagai salah satu organisasi pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan serta pertanggungjawaban atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Bandung. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Bandung, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban kinerja BPBD Kabupaten Bandung selaku instansi atau lembaga pemerintahan yang bergerak di sektor/bidang penanggulangan bencana.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 5 sasaran diaplikasikan menjadi 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja pencapaiannya berhasil 10 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria pencapaian indikator dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pencapaian indikator kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana akuntabilitas keuangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pencapaian kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
2. Pencapaian indikator kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.
3. Akuntabilitas keuangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Menurut Syahrudin Rasul (2002 : 8) mengemukakan bahwa : "Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006 : 3) menyatakan bahwa : "Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik."

2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010) bahwa akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi lima bagian yakni:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan yang akan atau telah diambil.
5. Akuntabilitas Finansial
Jenis akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya.
Menurut Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu:
 1. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan.
 2. Akuntabilitas Horisontal
Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara.

2.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dimensi akuntabilitas terbagi ke dalam lima bagian antara lain :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probility and Legality*). Akuntabilitas hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi dan Akuntabilitas kejujuran merupakan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas Manajerial disebut juga dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) yang artinya pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program adalah program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Sebuah lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Lembaga-lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

[Date]

5. Akuntabilitas *Financial* adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*Public Money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Job Performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007 : 153) bahwa : “Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan.”

2.2.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Mahmudi (2002) yaitu sebagai berikut : “Didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Definisi Indikator kinerja juga dikemukakan oleh LAN (2003:13), yaitu : “Dalam mendefinisikan indikator kinerja, dan ditambahkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting, karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.”

2.2.3 Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2.3.2 Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut LAN (2003:5), agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Pencapaian kinerja BPBD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP. Di samping itu pula bahwa, untuk dapat menjelaskan tentang capaian akuntabilitas kinerja unit kerja BPBD, sesuai dengan format baru penyusunan LAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara sederhana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat secara langsung capaiannya pada setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam format Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 5 sasaran diaplikasikan menjadi 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja pencapaiannya berhasil 10 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria pencapaian indikator dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

**Tabel 3.1.
Angka Kriteria Pencapaian Indikator**

Angka	Keterangan
➤ 85 S.D 100	Memuaskan
➤ 75 S.D 85	Sangat Baik
➤ 65 S.D 75	Baik
➤ 50 S.D 65	Cukup Baik
➤ 30 S.D 50	Agak Kurang
➤ 0 S.D 30	Kurang

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan sedangkan Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja terhadap target tahun 2014 sendiri dan terhadap target 2015. Adapun perlunya dibandingkan terhadap target 2015 agar tergambar sisa target yang harus dicapai pada 1 tahun terakhir mengukur dengan kemampuan yang ada pada saat ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

[Date]

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

No	Sasaran	Capaian Indikator Kinerja					
		Uraian	Target TA 2015	Target TA 2014	Realisasi TA 2014	Persentase capaian terhadap target TA 2014	Persentase capaian terhadap target TA 2015
1.	Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana	Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam	100	100	100	100	100
		Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana	Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana	100	100	99,8	99,8	100
		Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat	100	100	100	100	100
3.	Terbentuknya kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap Kecamatan	Persentase ketersediaan personil kebencanaan yang handal		40 orang personil DAra	40 orang personil DAra	100	100
4.	Berkurangnya ancaman dan kerentanan Bencana	Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya		1 dok dan 31 Kec	1 dok dan 31 Kec	94	31
5.	Tersusunnya produk hukum daerah penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun	1 dokumen Perbup ttg Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1 dok	1 dok	100	100
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, sasaran utama masyarakat wilayah rawan Bencana	Jumlah Kecamatan yang siaga bencana di Kabupaten Bandung	1 Kec	31 Kec	31 Kec	100	100

[Date]

**Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung | Rosa Fitriana, Andrean**

7.	Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat pasca Bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pascabencana		100	48	48	100
8.	Terintegrasinya informasi kebencanaan daerah	Cakupan wilayah Kabupaten Bandung yang telah terbangun sistem data dan informasi kebencanaan daerah	31 Kec	100	100	88	100
9.	Meningkatnya kapasitas SDM kebencanaan	Jumlah personil yang telah mengikuti pelatihan	40 orang petugas <i>trauma healing</i>	250	250	98	250

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dimulai dari kegiatan perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 terhadap tahun berjalan (tahun 2014) dari tabel 3.1 terdapat 3 indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% yaitu :

1. Indikator Persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana hanya mencapai 99,8 untuk bantuan logistik dan 77% untuk peralatan kebutuhan korban. dibanding rencana 100%, disebabkan program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut didukung 2 kegiatan, untuk logistik yang tersedia pada BPBD terlaksana 99,8% dan untuk peralatan kebutuhan korban bencana hanya 77% yang di dukung oleh kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi korban bencana alam, Sisa anggaran sebesar Rp. 576.163.000,- tidak terserap disebabkan karena Sisa penawaran dari pihak ketiga dan Gagal lelang dalam pengadaan *ambulance*
2. Indikator jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya sudah terealisasi 31 Kecamatan atau 94% tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa komponen pemetaan yang belum tercapai sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 tahun 2011 tentang standarisasi data kebencanaan.
3. Indikator Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana hanya mencapai 48% sangat rendah dibanding rencana yaitu 100%, hal ini disebabkan karena program/kegiatan yang mendukung indikator mengalami beberapa kendala yaitu hambatan dari tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 351.953.900,- atau 86%.

3.1.3 Perbandingan antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Target RPJMD

Sasaran membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, tahun lalu dan target RPJM yaitu Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan pelayanan cepat dalam penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

[Date]

Tabel 3.3.
Sasaran Terselenggaranya Pelayanan cepat penanggulangan bencana

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	% capaian Tahun 2014	Realisasi capaian kinerja (%)		
				2013	2012	2011
Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam	100	100	100	100	0	0
Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	100	100	100	100	100	0

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu Indikator Persentase Personil yang siaga bencana tiap hari selama 24 jam tercapai 100% pada tahun 2014 dan 2013, kegiatan yang mendukung indikator ini baru dilaksanakan pada tahun 2013 berupa piket kebencanaan operator radio pusat pengendalian operasional dan personil BPBD selama 24 jam, sehingga pada tahun 2011 dan 2012 tidak tercapai dan Indikator Persentase Wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi tercapai 100% pada tahun 2014 karena hanya melaksanakan 1 tahap kegiatan tanggap darurat. Pada tahun 2012 dan 2013 juga tercapai 100%, seluruh kejadian bencana telah ditanggulangi BPBD Kabupaten Bandung melalui bantuan biaya tidak terduga.

3.1.4 Analisis capaian kinerja pelayanan tanggap darurat bencana

Sasaran untuk darurat kekeringan adalah ketersediaan perlengkapan pendukung penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan tersedianya perlengkapan pendukung penanggulangan bencana. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Terselenggaranya Pelayanan Cepat Penanggulangan Bencana

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	% capaian tahun 2014	Realisasi capaian kinerja (%)		
				2013	2012	2011
persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana	100	99,8	100	100	99,6	0
Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat	100	100	100	100	100	0

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

3.2. Pencapaian Indikator kinerja BPBD

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini ada 2 yaitu :

1. Indikator persentase bantuan logistik dan peralatan untuk kebutuhan korban bencana, indikator ini didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi tercapai 99,8% dari target 100% pada tahun 2014, di 2012 tercapai sebanyak 99,6% dan

[Date]

pada 2013 tercapai 100% meningkat 0,4% dan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam tercapai 77% dari target 100%.

2. Indikator Persentase kecamatan yang menerima bantuan pada saat tanggap darurat tercapai 100%. Pada indikator ini, kegiatan yang mendukung adalah dianggarkan dari biaya tidak terduga tanggap darurat bencana. Artinya adalah, karena bencana tidak dapat ditargetkan kejadian dan korbannya, maka untuk setiap korban yang terkena bencana pada saat tanggap darurat, target BPBD mengenai kebutuhan mereka akan terpenuhi 100% setiap tahunnya.

Berdasarkan data rekapitulasi peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung selama tahun 2014 hanya terjadi 1 kali tanggap darurat yaitu pada tanggal 23 - 29 Desember dengan korban dan kerugian pada 17 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 25 Desa Kabupaten Bandung. Tercatat sebanyak 31 kejadian. Adapun rincian kejadian bencana yang terjadi selama 2014 yakni, tanah longsor sebanyak 7 kejadian, banjir 12 kejadian, retakan tanah 3 kejadian, angin puting beliung 5 kejadian dan 4 kejadian lainnya. Dengan kondisi tersebut, Para korban bencana tetap berhak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pemenuhan kebutuhan para korban bencana pada tahun 2014 tidak hanya disediakan oleh pemerintah tetapi juga dari individu maupun kelompok masyarakat serta dari pihak swasta. Bantuan – bantuan tersebut selalu direkapitulasi dan kemudian didistribusikan kepada para korban bencana yang membutuhkan secara langsung ataupun melalui para relawan, dengan sasaran utama untuk membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tiap kecamatan yang digambarkan pada table sebagai berikut:

**Tabel 3.5.
Terbentuknya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana
di Tiap Kecamatan**

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	% capaian tahun 2014	Realisasi capaian kinerja (%)		
				2013	2012	2011
Ketersediaan personil kebencanaan yang handal	40 orang	40 orang	100	110	100	0

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Capaian indikator ketersediaan personil kebencanaan yang handal pada tahun 2012 tercapai 100%; pada tahun 2013 tercapai 110% artinya melebihi target sebesar 10% dan pada tahun 2014 tercapai 100%. Dan capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

Untuk membentuk personil kebencanaan yang handal diperlukan pelatihan penanggulangan bencana baik dari segi teori maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, BPBD telah melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan internal BPBD maupun dengan bekerja sama dengan lembaga lain. Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPBD yaitu Pelatihan *Damages and Losses Assesment* (DaLA) yaitu pelatihan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana bagi aparaturnya kecamatan serta pelatihan penggunaan radio komunikasi dengan output jumlah kecamatan yang terhubung dengan pusat informasi BPBD dan rambu evakuasi, dengan sasaran utama yaitu ketersediaan personil bencana yang handal adalah agar berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Berkurangnya Ancaman dan Kerentanan Bencana

Indikator	Target 2014	Realisasi 2014	% capaian tahun 2014	Realisasi capaian kinerja (%)		
				2013	2012	2011
Jumlah kecamatan yang telah dipetakan potensi bencananya	1 dok dan 31 Kec	1 dok dan 31 Kec	94	2 kec	1 kec	31 sketsa

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

Capaian indikator kinerja untuk sasaran ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana dengan *output* Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System* disingkat GIS) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis dalam sebuah database. Sistem ini dapat diakses oleh 31 Kecamatan. Kegiatan lainnya yaitu terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana dan pelatihan radio komunikasi dengan peserta dari seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung.
2. Kegiatan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana, pada tahun 2014 terpetakan wilayah rawan bencana di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Kriteria teknis untuk kegiatan pemetaan kawasan rawan bencana tidak sesuai perencanaan:
 - a) Tersusunnya peta rawan bencana se-Kabupaten Bandung perkecamatan, dalam hal ini kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang.
 - b) Tersusunnya peta rawan bencana detail, tetapi sampai saat ini hasil penyusunannya tidak sesuai dengan standarisasi peta.

3.3 Akuntabilitas Keuangan BPBD

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Bandung. Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2014 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Anggaran BPBD pada tahun 2014 adalah, sebesar Rp.10.578.288.055,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.308.737.745,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau pencapaian 88 %, dengan rincian belanja:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.302.214.835,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.188.857.683,- (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
2. Belanja langsung sebesar Rp. 8.276.073.220,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.119.880.062,- (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) yang dijabarkan melalui 10 Program 32 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

**Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung | Rosa Fitriana, Andrean**

**Tabel 3.7.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2014**

No.	Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)			
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
	2		3	4	5
	BELANJA	10.674.323.220	10.578.288.055	9.308.737.745	87,9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.324.450.000	2.302.214.835	2.188.857.683	95
A	BELANJA PEGAWAI	2.324.450.000	2.302.214.835	2.188.857.683	95
1	Gaji dan Tunjangan	1.823.705.000	1.713.466.000	1.613.170.010	94
2	Tambahan Penghasilan PNS	500.745.000	588.748.000	575.687.673	97,7
II	BELANJA LANGSUNG	8.349.873.220	8.276.073.220	7.119.880.062	97,78
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	900.694.470	900.694.470	892,662,622	99,1
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	28.800.000	28.800.000	24.258.622	84,23
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
6	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	31.514.600	31.514.600	31.514.600	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	56.432.300	56.432.300	56.259.500	98
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.157.000	40.157.000	40.157.000	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.119.890	15.119.890	15.119.890	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	334.556.280	334.556.280	331.238.700	99
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100

[Date]

12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.680.000	13.680.000	13.680.000	100
13	Penyediaan makanan dan minuman	77.040.000	77.040.000	77.040.000	100
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.245.000	142.245.000	142.245.000	100
15	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	58.500.000	53.100.000	53.100.000	100
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	736.820.000	663,020,000	599.615.500	99.78
1	Pembangunan Gedung	400.000.000	400.000.000	336.831.000	99,82
2	Pengadaan Mebelair	88.250.000	88.250.000	88.015.000	99,7
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.900.000	25.900.000	25.900.000	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	222.670.000	148.870.000	148.869.500	99,9
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
1	PengadaanPakaianDinas Beserta Perlengkapannya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	16.440.000	16.440.000	16.440.000	100
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	16.440.000	16.440.000	16.440.000	100
III	BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM				
A	Program pengembangan data/informasi	1.000.000.000	1.000.000.000	895.949.200	89,5
1	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan Bencana	700.000.000	700.000.000	615.234.200	88
2	Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	300.000.000	300.000.000	280.715.000	94
B	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	115.250.000	115.250.000	115.250.000	100
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	115.250.000	115.250.000	115.250.000	100
C	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	400.000.000	400.000.000	48.046.100	16
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	400.000.000	400.000.000	48.046.100	16

[Date]

**Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bandung | Rosa Fitriana, Andrean**

D	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	200.000.000	200.000.000	188,500,000	99
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	200.000.000	200.000.000	188,500,000	94,25
E	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	520.750.000	520.750.000	506.130.000	97
1	Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/ Sosial	520.750.000	520.750.000	506.130.000	97
F	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.439.918.750	4.439.918.750	3,837,286,640	86
1	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	1.050.000.000	1.050.000.000	1.026.952.390	98.10
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	2.499.418.750	2.499.418.750	1.923.255.750	77
3	Pengadaan Logistik dan Obat- obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	500.000.000	500.000.000	499.283.500	99.9
4	Sosialisasi Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana	200.000.000	200.000.000	197.295.000	99.9
5	Penyusunan Rumusan Kebijakan Bencana Daerah	190.500.000	190.500.000	190.500.000	100

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
2. BPBD Kabupaten Bandung, pada tahun 2014 telah menetapkan 9 sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ke 5 sasaran diaplikasikan menjadi 11 indikator kinerja. Dari 11 indikator kinerja pencapaiannya berhasil 10 dan 1 indikator kinerja tidak berhasil. Kriteria pencapaian indikator dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator kinerja dari BPBD Kabupaten Bandung ini sudah sangat baik karena dapat mencapai angka pencapaian 80%.
3. Pencapaian kinerja dari BPBD dipengaruhi oleh indikator kinerja yang dilakukan oleh BPBD sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan maka disini penulis dapat menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja dari BPBD ini sudah baik karena

[Date]

didukung oleh indikator kinerja yang sudah baik, dimana angka presentase pencapaiannya sudah melebihi 80%.

4. Akuntabilitas Keuangan di BPBD Kabupaten Bandung sudah baik, hal ini dapat dilihat dari Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

4.2 Saran

Dari pembahasan diatas penulis dapat mengemukakan saran yang mungkin berguna untuk kelancaran atas Akuntabilitas Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung diantaranya:

1. Dalam pencapaian kinerja alangkah baiknya instansi dapat memperbaiki atau memberikan pelatihan kepada para karyawan yang lebih banyak dan berkualitas lagi, agar setiap karyawan BPBD mempunyai kemampuan yang lebih berkompeten dalam menanggulangi bencana, sehingga apabila terjadi suatu bencana karyawan sudah bisa lebih sigap untuk mengatasi bencana yang ada. Jika bisa hendaknya mengikuti pelatihan yang bersertifikat sehingga bisa lebih terdata dan teruji keahliannya, dan dapat dijadikan sebagai nilai tambah terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan.
2. Melakukan Inventarisir terhadap peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh BPBD agar dapat mengetahui mana peralatan dan perlengkapan mana yang masih layak digunakan, apakah memerlukan *maintainance* rutin, atau apakah ada peralatan atau perlengkapan yang harus diganti, sehingga apabila terjadi bencana peralatan dan perlengkapan bisa digunakan dan tidak menghambat kegiatan BPBD dalam rangka menolong masyarakat yang terkena bencana, misalnya dengan memiliki tempat penyimpanan dan perawatan yang baik terhadap peralatan dan perlengkapan, melakukan checklist terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan baik.
3. Memberi penyuluhan kepada masyarakat terhadap kesadaran akan tanggap bencana, disini penulis menyarankan sebaiknya pihak BPBD lebih banyak mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah yang rawan bencana, agar masyarakat bisa memahami tentang pentingnya akan tanggap bencana, dan memahami apabila terjadinya bencana mereka sudah tidak panik dan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti prosedur-prosedur pada saat terjadinya bencana.
4. Untuk akuntabilitas keuangannya di BPPD agar bisa lebih mewujudkan akuntabilitas publik disarankan untuk menggunakan sistem akuntabilitas dalam rangka pemberian pelaporan keuangan yang lebih sistematis dan terintegritasi dengan baik agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diperoleh dan lebih mudah lagi untuk dipahami oleh para penggunanya yang kemudian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan langkah-langkah strategis terutama dalam pemberian layanan untuk masyarakat umum dan atau memberi pertolongan pada waktu terjadinya bencana.

Referensi :

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.

Mangkuprawira, TB.S dan A.V. Hubeis. 2007. Manajemen Mutu Sumber Daya. Manusia. Bogor : Ghalia Indonesia.

Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan. Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

<http://bpbd-kabbandung.blogspot.com/2010/12/struktur-organisasi.html> (diakses pada 14 November 2019)

<https://www.bandungkab.go.id/arsip/profil-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-bandung> (diakses pada 25 November 2019)

<https://bumicuekcommunity.wordpress.com/2017/01/02/dasar-hukum-pembentukan-bpbd-badan-penanggulangan-bencana-daerah-provinsi-dan-kotakabupaten-1/> (diakses pada 26 November 2019)

http://repository.maranatha.edu/19537/7/0554026_Conclusion.pdf (diakses pada 20 Desember 2019)